



BOOK REVIEW

Conflict Over Natural Resources In The Global South : Conceptual Approaches

Dewa Ayu Putu Eva Wishanti

Pengajar Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya, Malang

Judul:

Conflict Over Natural Resources In The Global South : Conceptual Approaches

Editor:

Maarten Bavinck, Lorenzo Pellegrini, Erik Mostert

Penerbit:

CRC Press Taylor & Francis Group, London, UK

Tahun Terbit:

2014

Dengan sifatnya yang konfliktual karena memiliki nilai ekonomi dan penguasaan teritori yang kompleks,

pendalaman kajian soal sumber daya alam semestinya mendapat porsi ilmiah yang lebih besar. Lebih lagi, riset yang dibukukan, utamanya yang terkait dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih kurang komprehensif. Berbagai opini yang vokal, utamanya dari organisasi masyarakat sipil, masih bernada reaktif dan tidak didukung penelitian dan pengelolaan data yang terstruktur sebagai lawan dari narasi arus utama. Pun demikian dengan kajian akademik yang membahas perihal pengelolaan sumber daya alam. Kajian-kajian tersebut masih terkendala dengan akses data, akses keuangan, dan lembaga pendanaan penelitian pun masih kurang menyediakan alokasi bagi penelitian berbasis sumber daya alam di Indonesia, utamanya yang terkait bidang sosial-politik. Lebih luas lagi, dunia yang dibagi menjadi bagian utara dan selatan oleh beberapa organisasi internasional, misalnya United Nations Development Programme (UNDP), pun memiliki sisi historis yang berbeda dalam menyikapi konflik-konflik sumber daya alamnya. Tidak dapat dipungkiri, di negara-negara selatan yang mayoritas masih berkembang, sumber daya alam masih menjadi sektor pemasok pendapatan negara yang paling utama.

Untuk lebih mendapatkan gambaran tentang pendekatan-pendekatan konseptual yang mungkin dapat membantu memahami konflik, buku setebal 204 halaman ini menyajikan hasil-hasil penelitian tentang konflik sumber daya alam di negara-negara selatan. Pendekatan konseptual ini menjadi penting sebagai dasar memulai perdebatan, utamanya demi menyelami kondisi kekhususan yang bervariasi di tiap negara. Buku ini disusun oleh para akademisi dan peneliti Belanda yang bernaung di bawah *The Netherlands Organization for Scientific Research, Science for Global Development Division (NWO/WOTRO)* serta Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda. Penyusunan buku ini juga berada di bawah *Conflict and Cooperation over Natural Resources in Developing Countries (CoCooN Programme)* yang menjalankan tujuh proyek penelitian dalam bidang konflik dan kerja sama terkait sumber daya alam. Hal ini tidak mengherankan mengingat Belanda memiliki

tradisi keilmuan yang mengakar di bidang pengelolaan sumber daya alam dan Belanda juga merupakan asal muasal berbagai perusahaan multinasional terkemuka di bidang ekstraktif dan manufaktur.

Terdapat 11 bab atau bagian buku yang memperkenalkan konsep-konsep terpenting menurut ringkasan penelitian dari kurang lebih 40 kontributor bagi buku ini.

Dalam pengantarnya, editor buku ini mengarahkan perspektif pembaca ke ruang lingkup kemiskinan sebagai akibat dari kurangnya akses terhadap sumber daya alam. Namun di lain sisi, kemiskinan juga dapat menjadi akar konflik yang seringkali menjadi karakteristik utama eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sektor primer di mana banyak masyarakat miskin Afrika dan Amerika Latin bergantung kepadanya. Seiring perkembangan tantangan alam yang makin sering terjadi, perubahan iklim menjadi fenomena baru pula bagi masyarakat yang rentan, yang bahayanya bahkan sering kurang disadari oleh masyarakat itu sendiri. Dengan pendekatan studi kasus yang dikedepankan para peneliti CoCooN Programme, bagian-bagian buku ini diarahkan untuk memotret kasus spesifik yang dialami masyarakat negara-negara selatan saat berhadapan dengan konflik penguasaan sumber daya alam.

Bagian kedua buku ini juga masih menyoroti bagaimana riset CoCooN Programme diselenggarakan, dengan menjelaskan poros hubungan utama atau *nexus* di antara sumber daya alam dengan konflik. Bagian ini penting untuk meletakkan pemahaman dasar tentang eskalasi konflik yang terjadi secara simultan, namun juga menampilkan beberapa derajat intensitas konflik itu sendiri. CoCooN Project juga berupaya melibatkan peran pemerintah Belanda lewat domain-domain kebijakannya yang bertujuan mencegah maupun menghadapi konflik sumber daya alam.

Frerks, Dietz, dan Van Der Zaag sebagai penyusun bagian ini meninjau konflik dan kerja sama dalam sektor sumber daya alam. Ketiga peneliti yang berlatar belakang masing-masing studi kebencanaan, studi Afrika, dan manajemen air tersebut berkolaborasi untuk menemukan hubungan

yang permanen antara konflik dan sumber daya alam, khususnya air. Mereka menyoroti bahwa degradasi lingkungan merupakan salah satu penjelasan kunci dalam konflik baik di level mikro maupun makro, selain faktor kuat lain semisal kelangkaan sumber daya dan sempitnya akses distribusi. Terdapat fokus lain, bahwa justru keberlimpahan sumber daya juga merupakan masalah tersendiri, yang sering dinamai para akademisi sebagai kutukan sumber daya atau *resource curse*. Kutukan tersebut berwujud dalam beberapa bentuk “peperangan” yang berevolusi, kerakusan, dan masa suram, serta menjelaskan pula tentang ekonomi kekerasan yang menjabarkan banyak aspek mengapa pergerakan pemberontak muncul untuk menguasai komoditi tertentu.

Bagi studi hubungan internasional, konflik yang dijabarkan dengan pendekatan multi-kausal, multi-level, dan multi-aktor tersebut sangat berguna untuk memediasi konflik yang berhubungan dengan lingkungan untuk mencapai konsensus pembagian sumber daya di level global. Pendekatan interdependensi yang klasik digunakan untuk memahami kebutuhan akan sumber daya juga banyak digarisbawahi. Mediasi yang ditawarkan akan kebutuhan tersebut juga cukup unik, yakni bina damai di bidang lingkungan. Namun, peran aktor politik yang banyak disoroti justru datang dari golongan tradisional, yakni Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanannya, serta tanggung jawab korporasi. Di sisi lain, kemunculan berbagai inisiatif transparansi dari komunitas transnasional juga dielaborasi. Inisiatif-inisiatif tersebut justru datang dari negara-negara utara yang secara langsung memberikan tekanan bagi forum-forum negara berekonomi maju maupun pendonor bantuan asing.

Pendekatan multi-kausal yang ditawarkan ketiga peneliti tersebut dikerucutkan lagi oleh studi Profesor Murshed di bagian ketiga, yang mengarahkan pembaca untuk memahami arah konflik yang berlandaskan motif ekonomi. Perang sipil yang dijadikan obyek penelitiannya mendasarkan bahwa secara historis di era Perang Dingin, konflik internal di suatu negara bersumber

dari perebutan sumber daya alam baik ketika sedang terjadi kekurangan maupun keberlimpahan. Sumber daya yang dimaksud yakni air, hutan, dan tanah untuk tujuan pengolahan. Konteks konflik yang dimaksud ialah pada saat terjadinya transisi demokrasi di mana di saat bersamaan terjadi pula transisi kepemilikan sumber daya. Selain perang sipil, tipe konflik yang menarik dipahami ialah konflik yang terlokalisasi dan konflik sektarian. Pada akhirnya, kemajuan ekonomi yang melesat juga menghasilkan potensi resiko konflik yang meningkat pula. Namun demikian juga dengan situasi *underdevelopment*, di mana benih konflik semakin kentara dalam situasi kelangkaan sumber daya.

Rutten dan Mwangi di bagian keempat mulai memaknai kembali konsep *natural* atau “alam” dari istilah “sumber daya alam” serta “konflik sumber daya alam” secara generik. Kedua peneliti yang masing-masing berlatar belakang studi kawasan Afrika serta teknologi dan ilmu perairan menjabarkan empat jenis konflik yang terkait lingkungan, yakni konflik keanekaragaman hayati, konflik di garis pantai, konflik kesenjangan di kalangan wanita, serta konflik kualitas udara dan polutan beracun. Kedua peneliti juga menemukan pertentangan definisi tentang sumber daya alam, yang secara sempit dimaknai sebagai minyak, gas, mineral dan metal, dengan definisi yang juga mengikutkan hutan, air, tanah, organisme yang dapat dimanfaatkan dan padang ternak sebagai obyek. Di Afrika khususnya, terdapat komodifikasi sumber daya alam yang diterangkan sebagai akibat dari gesekan antara kegiatan produksi dengan tekanan pertumbuhan populasi. Situasi tersebut ditambah lagi dengan meningkatnya intensitas aktor internasional dalam pengelolaan sumber daya di Afrika. Keadaan ini dijelaskan dengan studi kasus tentang *East Africa Portland Cement Company* (EAPCC) di Kenya. Seharusnya bagian ini diletakkan di awal agar pembaca dapat mengerti lebih dahulu tentang perkembangan pemaknaan dan konteksnya, baru kemudian disajikan pendekatan-pendekatan yang sektoral.

Bagian kelima beralih ke konflik negara selatan yang klasik di Timur Tengah, khususnya di Ethiopia, Yaman, dan Palestina. Smidt *et. al.*, mengedepankan peran politik

dalam mengatasi konflik air bawah tanah. Palestina dan Yemen dikategorisasikan sebagai “*fragile states*”, sementara Ethiopia dikategorisasikan sebagai negara demokratik yang sedang berkembang dengan elemen negara otokratik. Air bawah tanah menjadi sumber daya yang strategis karena tidak membeku di musim dingin, lebih tersebar lokasinya, sekaligus memiliki aspek lokalitas, dan juga terbarukan. Penelitian Smidt dengan beberapa peneliti lainnya di bawah proyek *Groundwater in Political Domain* mendalami konteks konflik air bawah tanahnya dengan tiga aspek, yakni domain politik, domain institusional, dan domain sosio-ekonomi. Konflik yang dapat muncul antar aktor ialah konflik substantif dan konflik relasional. Bagian buku ini mungkin yang paling menarik untuk dicermati, karena sekaligus menggabungkan perspektif dari konflik yang sudah mendera selama ini di ketiga negara, di mana penguasaan sumber daya air juga merupakan alat politik untuk klaim teritorial yang lebih jauh lagi.

Zaitch, van Solinge, dan Müller meningkatkan pemahaman pembaca tentang konflik, hingga mencapai taraf kriminal di bagian keenam buku ini. Pendekatan tersebut ialah “*green criminological*” untuk memahami penggunaan lahan dan “*land grabbing*” yang terjadi di berbagai negara. Alih guna lahan yang sering disoroti ialah untuk penanaman tanaman sumber bahan bakar nabati, pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik dan lainnya. Studi kasus yang diambil berlokasi di perairan Cauca (Kolombia) and Tapajós (Brazil). Menarik untuk melihat *locus* Amerika Latin di mana banyak terjadi kasus kekerasan dan kartel-kartel kriminal yang telah ada. Dengan pendekatan kriminologi, kriminalitas yang banyak terjadi justru dari kalangan yang memiliki *power*, termasuk pemerintah sendiri di samping kejahatan korporasi seperti yang dikemukakan ketiga peneliti. Perspektif hak azasi manusia banyak dikemukakan dalam pembahasannya, yang sayangnya kurang mengelaborasi kepentingan kelestarian hak-hak ekologis sebagai subyeknya. Bagian ini masih menempatkan lingkungan sebagai obyek yang ditundukkan bagi kepentingan eksploitasi manusia, dengan secara sederhana mengidentifikasi bahaya

yang dapat diderita umat manusia dengan merebaknya “*green criminalities*”.

Bagian ketujuh masih menyinggung Amerika Latin yang kali ini terkait dengan sisi hak kekayaan intelektual. Di Bolivia dan Ekuador, wacana nasionalisasi perusahaan dan industri ekstraktif sangat menguat pasca terpilihnya Morales dan Correa. Nasionalisasi ini dimaknai sebagian akademisi sebagai perampasan kekuasaan yang drastis dari pihak swasta, sekaligus mendefinisikan ulang peran negara dalam mengelola sumber daya alam. Sorotan pokok bagian ini cukup tepat dengan menekankan pada transformasi kebijakan di bidang kekayaan intelektual, karena sisi ekonomi-politiknya dapat terlingkupi dengan komprehensif. Terdapat beberapa tipe hak yang cukup konflikual, yakni hak akses dan penarikan, hak manajemen, hak eksklusif, dan hak alienasi. Pembahasan bagian ini justru kurang luas karena hanya menekankan pada hak kepemilikan lahan dan pertambangan yang secara langsung mereduksi konsep sumber daya alam seperti yang dijelaskan pada bagian keempat.

Tambang emas menjadi obyek penelitian yang selalu mengemuka, seperti dibahas dalam bagian kedelapan. De Theije *et. al.*, kembali memperkaya? perspektif pembaca untuk memahami kasus-kasus di Amerika Latin, yaitu di Suriname, Colombia, dan Brazil dengan konteks historis dan skala yang berbeda. Dengan pendekatan pluralisme hukum, bagian ini mendalami kasus pertambangan emas berskala kecil yang hendak dilegalkan sebagai bentuk kebijakan publik yang urgen. Tujuan legalisasi tersebut ialah pada terbentuknya praktek pertambangan yang bertanggung jawab di berbagai skala. Legalisasi ini konflikual karena terdapat beberapa kode hukum yang berlaku di kalangan penambang emas skala kecil, yakni hukum nasional, hukum penambang yang tak tertulis, serta regulasi komunitas penambang yang khas daerah masing-masing. Kasus klasik yang terjadi di Suriname tentang penyerahan lahan adat kepada perusahaan tambang multinasional banyak pula terjadi di negara selatan pada umumnya. Namun di sini, komunitas penambang skala kecil *Makambo* mampu

melakukan perlawanan hukum terhadap pemerintah dan perusahaan.

Bavinck, Sowman, dan Menon juga membahas pluralisme hukum di bagian kesembilan, namun dengan mengambil obyek penelitian tentang perikanan di Asia Selatan dan Afrika Selatan. Penekanan konteks konflik yang terjadi dalam isu ini ialah pada banyaknya aktor yang berkepentingan dan juga hadirnya pluralisme hukum. Perbandingan kedua kawasan ini menjadi relevan karena terdapat persamaan situasi, yakni merebaknya kegiatan budidaya perikanan skala kecil yang juga memiliki konteks historis yang mirip. Sifat konflik yang terjadi juga relatif seimbang, yakni dalam tata kelola penggunaan lahan pesisir, pengkonstruksian kolam-kolam dan tambak, serta pembagian penguasaan laut untuk perikanan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan di antara masyarakat, bukan hanya ekonomi, melainkan kekuatan dan dominasi. Undang-undang perikanan dan bentuk kerja sama kolektif antar masyarakat sangat banyak dipaparkan dalam bagian ini, sehingga sedikit melupakan kedalaman studi kasusnya sendiri utamanya di Asia Selatan. Kelebihannya ialah penyajian kerangka komparatifnya yang mampu menangkap tren dari konflik budidaya perikanan sendiri.

Kasus terakhir yang diteliti oleh CoCoon Project ini tertuang di bagian kesepuluh, yakni kasus bahan bakar nabati, menjadi penutup yang sesuai bagi rangkaian penelitian sebelumnya. *Jatropha Curcas* di Ghana dan Ethiopia merupakan sejenis tanaman dalam golongan kacang-kacangan yang digunakan untuk memproduksi *biofuel*. *Jatropha* banyak digunakan sebagai alternatif kedelai dan sawit sebagai bahan baku *biofuel*. Merebaknya penanaman *jatropha* dalam skala perkebunan mengakibatkan banyaknya konflik kesejahteraan sosial-ekonomi, sertifikat tanah, keamanan pangan, dan periode lahan kering yang semakin panjang. Kondisi ini membuat kehadiran perluasan *jatropha* dilematis. Kerangka analitis yang digunakan oleh Timko sebagai peneliti melandaskan pada peran konsultansi warga lokal dalam menempatkan *jatropha* sebagai sumber pendapatan, dampaknya terhadap kepemilikan lahan dan penggunaan lahan,

serta pengamatan dampak sosial-ekonomi di level rumah tangga. Penelitian ini cukup mikro namun dapat menjelaskan bagaimana dengan pendekatan partisipatoris, keamanan energi mampu dicukupi sekaligus mengelola konflik dengan menyesuaikan pada kondisi alam.

Bab kesebelas mengevaluasi seluruh bab sebelumnya, dengan kata lain para peneliti CoCoon mengevaluasi sendiri pendekatan-pendekatan penelitiannya serta kemampuannya dalam menghasilkan input kebijakan sekaligus kemampuannya berkontribusi pada sains. CoCoon berinovasi dengan tiga tujuan yakni menyediakan alat bagi masyarakat negara-negara berkembang untuk mengembangkan desain kebijakan berbasis pembangunan, menghasilkan pengetahuan, serta menggalakkan pembangunan kapasitas bagi organisasi, kelompok, dan individual.

Buku ini sangat relevan bagi penstudi konflik dan kerja sama, utamanya bagi transformasi konflik. Dengan berbagai pendekatannya yang cenderung kualitatif, perlu adanya bacaan lanjutan bagi pembaca dari kalangan saintifik dengan berbagai metode pelengkap khususnya untuk mengetahui derajat konflik dan kerja sama dengan metode formal maupun kuantitatif lainnya. Bagi pembaca populer, bahasa yang disajikan dalam buku ini sangat mudah dipahami dan tidak terlalu ilmiah, namun pembaca harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan awal seputar konflik, hukum, dan beberapa istilah teknis yang tidak terlalu dalam. Buku ini juga dapat memotivasi kalangan akademisi untuk mendokumentasikan hasil-hasil penelitian yang sejalan dengan beberapa struktur yang dapat dipelajari serta penyajian hasil penelitiannya yang ringkas. Secara umum, negara-negara selatan yang menjadi obyek penelitian dalam buku ini masih dipandang dari perspektif negara utara, dengan sudut pandang struktural dan dependensi yang cukup kuat. Di sisi lain, studi kasus yang diangkat sebenarnya cukup mampu menyentuh persoalan riil yang dialami kebanyakan negara selatan dalam pengelolaan sumber daya alamnya, yakni penyusunan regulasi yang berpihak pada partisipasi rakyat, dependensi terhadap pengarahan negara bekas

penjajahnya utamanya di Amerika Latin dan Afrika, serta kelemahan dalam berinovasi di bidang teknologi dan pengetahuan.

Walaupun sayangnya penelitian CoCoon Projects tidak menyentuh soal sumber daya alam strategis seperti minyak, gas, dan batubara yang cukup sensitif secara politis dan geopolitik; bagi para pemangku kebijakan, buku ini mampu menjadi inspirasi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis partisipasi masyarakat. Pembaca secara umum juga diarahkan untuk melihat konflik antar manusia sebagai pemicu kelangkaan dari sumber daya itu sendiri, dengan berbagai regulasi di berbagai level pengelolaan. Latar belakang peneliti-peneliti CoCoon cukup bervariasi, dari lembaga dan universitas terkemuka di Belanda dan negara-negara lokasi obyek penelitian, seperti ISS Erasmus University Rotterdam, Wageningen University, Otoritas Air Palestina, Clingendael, Delft University of Technology, UFPA/NAEA Center for Advanced Amazon Studies Brazil, Mekelle University Ethiopia dan lainnya. Dengan demikian pembaca dapat menantikan kemajuan-kemajuan riset dan mungkin buku selanjutnya dari para kontributor yang cukup mumpuni di bidangnya.

**Dewa Ayu Putu Eva Wishanti adalah seorang pengajar Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya, Malang. Peminat isu-isu dan riset sumber daya alam dari perspektif ekonomi-politik internasional, khususnya tata kelola lingkungan, air, dan energi global. Dapat dihubungi lewat e.wishanti@ub.ac.id*

